

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBAYARAN
MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP BEKASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1)
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Darma Persada**

Oleh

**JULEHA
NIM 03420019**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
2008**



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUNTANSI

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25
Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada
KPP Bekasi”

Oleh :

Nama : Juleha

NIM : 03420019

Telah disetujui untuk diajukan

Jakarta, 13 Februari 2008

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing Materi

(Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM)

(Drs Haryanto, AK, MM)



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JURUSAN AKUNTANSI

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25
Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada
KPP Bekasi”

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji skripsi pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Februari 2008
Waktu : 14.00 s.d selesai
Oleh :
Nama : Juleha
NIM : 03420019

Panitia Penguji Skripsi

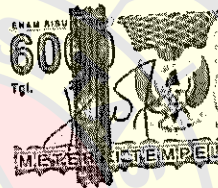
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM	Ketua	
Drs. Sunarto widodo, SE. AK	Anggota	
Drs Haryanto, AK, MM	Anggota	

LEMBAR PERNYATAAN

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Bekasi"

Bersama ini penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya. Skripsi ini disusun dibawah bimbingan Drs. Haryanto, AK, MM.

Jakarta, 13 Februari 2008



(Juleha)

ABSTRAK

(A) Juleha : 03420019

(B) Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Bekasi.

(C) ix ± 76 Hal, 15 Lampiran

Pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah, untuk menjalankan roda pemerintahan maupun dalam upaya peningkatan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum melalui penyediaan sarana dan prasarana umum serta pengolahan sumber daya manusia yang ada.

(D) **Alasan dan Tujuan Penelitian** : Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dengan pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi pada KPP Bekasi, serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi pada KPP Bekasi.

Hasil Penelitian : menunjukkan bahwa tingkat pengawasan atas pembayaran masa PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi harus ditingkatkan, karena belum sepenuhnya efektif berdasarkan data dari penelitian, bahwa jumlah penerimaan pajak dari tahun 2005 sampai 2006 mengalami penurunan sebesar 0,13 % serta diikuti juga dengan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan dan melaporkan SPTnya sebesar 11,12 %.

Kesimpulan dan Saran : Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bekasi dalam melakukan penyisiran terhadap pengawasan pembayaran masa PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi masih belum merata semuanya, sehingga masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, oleh karena itu KPP Bekasi harus dapat meningkatkan mutu pelayanan dan informasi kepada wajib pajak, serta melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas pembayaran masa PPh pasal 25 WP OP secara intensif.

(E) **Pembimbing Materi** : Drs Haryanto, AK, MM

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat taufik, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa tugas yang diterima cukup berat, karena dalam penelitian tidak hanya mengembangkan teori – teori yang didapat selama di bangku kuliah saja, akan tetapi, pengalaman terjun ke lapangan, penafsiran, dan analisis yang baik tentunya akan menghasilkan buah pikiran yang baik pula.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini selesai karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak – pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta yang telah banyak memberikan kasih sayang, do'a, semangat serta dukungan baik moril maupun materil selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Bapak Drs. Haryanto, AK, MM, selaku pembimbing materi yang telah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan sabar, dan telah memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, AK, MM, selaku ketua jurusan akuntansi yang telah masukan dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis.
4. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah tulus ikhlas menransfer ilmu pengetahuannya kepada penulis, sehingga penulis dapat memperoleh wawasan, khususnya tentang perpajakan
5. Ibu Syamsidar selaku korlak PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi pada KPP Bekasi yang telah banyak memberikan bantuan dalam pencarian data – data yang diperlukan dalam skripsi ini.
6. Mba Emma yang telah rela memberikan bantuannya kepada penulis dalam meminta data pada bagian PDI
7. Kakak ku Nyai Sulastri, adik – adik ku (Misin, M. Muktar, dan Abdul Rojak) serta keponakan ku tercinta Laden Anugrah R.H. yang telah memberikan dukungan dan semangat selama pembuatan skripsi.
8. Sahabat – sahabat ku di kampus yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, khususnya kepada gank delapan (Devina, Hikmah, Ilhami, Dian, Fitri, Fena, dan Mifta) yang telah banyak memberikan bantuan, semangat, dukungan serta yang selalu ceria dalam kebersamaan baik suka maupun duka.
9. Sepupu ku M. Husen terima kasih banyak, karena telah rela meluangkan waktunya untuk nganterin penulis dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
10. Sahabat – sahabat ku yang ada di rumah yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, khususnya kepada (Dede, Choiroel, Riyan , Syaprudin,

Wahyu, dan Dedy) terima kasih banyak atas semua saran – saran dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt berkenan membalas segala kebaikan Bapak. Ibu dan semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jakarta, 13 Februari 2008

(Juleha)



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Skripsi	i
Lembar Pengesahan Skripsi	ii
Lembar Pernyataan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	4
1.2.3 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Metodologi Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7

Bab II Landasan Teori	
2.1 Perpajakan	10
2.1.1 Pengertian perpajakan	10
2.1.2 Fungsi pajak	11
2.1.3 Asas – asas pemungutan pajak	11
2.1.4 Sistem pemungutan pajak	15
2.2 Pajak orang pribadi	16
2.2.1 Pengertian subjek pajak	16
2.2.2 Subjek PPh orang pribadi	16
2.2.3 Objek pajak penghasilan	20
2.2.4 Tarif PPh orang pribadi	26
2.3 Pajak penghasilan pasal 25	27
2.3.1 Cara perhitungan PPh pasal 25	27
2.3.2 Beberapa kasus yang berkaitan dengan PPh pasal 25	29
2.3.3 Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25	31
2.4 Pengawasan	31
2.4.1 Pengertian pengawasan	31
2.4.2 Fungsi pengawasan	32
2.5 Kepatuhan	33
2.5.1 Pengertian kepatuhan	33
2.5.2 Fungsi kepatuhan	35

Bab III Objek Penelitian

3.1 Sejarah Singkat tentang KPP Bekasi	37
3.2 Struktur Organisasi	38
3.3 Kedudukan, tugas dan fungsi KPP Bekasi	48
3.4 Potensi pajak dan Prospek pajak di KPP Bekasi	49

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian

4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Jumlah WP OP terdaftar & efektif di KPP Bekasi	52
4.1.2 Rencana dan realisasi penerimaan pajak di KPP Bekasi	53
4.1.3 Analisis tingkat kepatuhan WP OP dlm menyampaikan SPT	55
4.2 Hasil Penelitian	57
4.2.1 Peran pengawasan	57
4.2.2 Sarana pengawasan pembayaran PPh pasal 25 untuk WP OP	59
4.2.3 Hasil pelaksanaan pengawasan pembayaran PPh psl 25 WP OP	61
4.2.4 Proses administrasi penerimaan pembayaran PPh pasal 25 WP OP	62
4.2.5 Kendala yang dihadapi KPP dlm meningkatkan kepatuhan WP OP	66
4.2.6 Upaya yang dilakukan KPP dlm mengatasi kendala yang dihadapi	67

Bab V Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran –saran	75

Daftar Pustaka

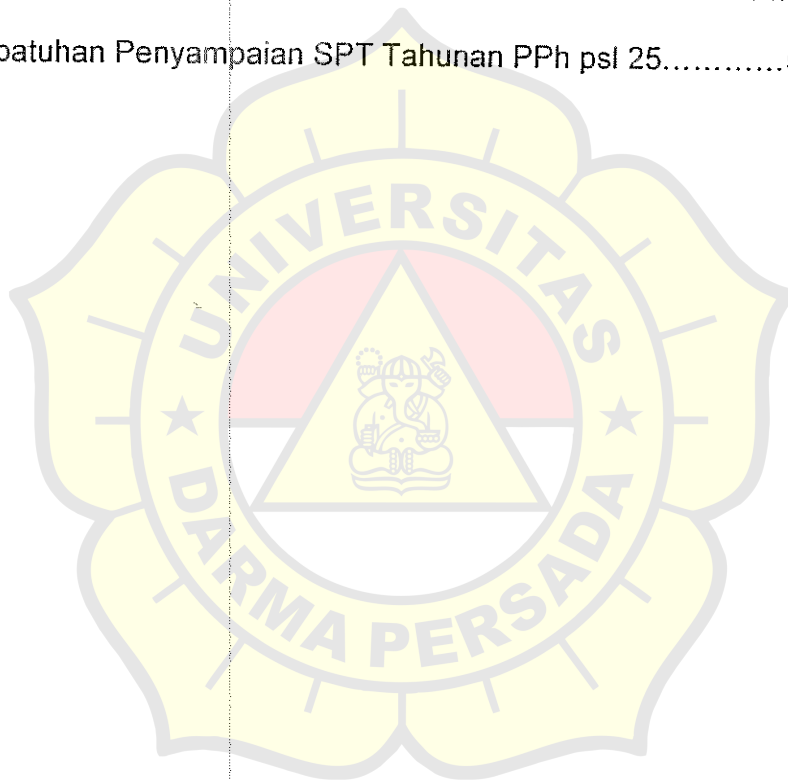
Daftar Riwayat Hidup

Lampiran-lampiran



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.5 Tarif PPh untuk WP dalam negeri	26
Tabel 4.1 Jumlah WP terdaftar dan WP efektif Thn 2005 & 2006.....	52
Tabel 4.2 Rencana dan Realisasi Penerimaan pajak Thn 2005 & 2006.....	53
Tabel 4.3 Tingkat kepatuhan penyampaian SPT masa PPh Pasal 25.....	55
Tabel 4.4 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh psl 25.....	56



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Bekasi51



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Magang di KPP Bekasi
2. Lembar Kegiatan Penyusunan Skripsi
3. Lembar Surat Setoran Pajak (SSP)
4. Lembar Pengawasan Arus Dokumen Angsuran Pembayaran PPh Pasal 25
Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Peta Kota Bekasi
6. Rencana KPP Pratama Bekasi Utara
7. Formlir 1770 S (SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi yang
tidak melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas).
8. Formulir 1770 S (Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final)
9. Formulir 1770 (SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP orang Pribadi)
10. Formulir 1770 – II (SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi)
11. Formulir 1770 – III (SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi)
12. Formulir 1770 – IV (SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi)
13. Formulir 1770 – I (Penghasilan Neto yang menggunakan Norma Perhitungan
Penghasilan Neto.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan dan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Perekonomian suatu negara dikatakan kuat bila kemandirian pembangunan tinggi artinya tidak tergantung pada hutang atau pinjaman luar negeri, tersebut dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri. Dana yang berasal dari luar negeri itu merupakan pelengkap sehingga secara bertahap harus dikurangi agar bangsa Indonesia tidak tergantung pada penerimaan luar negeri, oleh karena itu pemerintah perlu mengoptimalkan dana yang bersumber dari dalam negeri.

Dana yang berasal dari dalam negeri dapat diperoleh dari penerimaan pajak dan dari penerimaan bukan pajak. Sebagian penerimaan bukan pajak berasal dari ekspor minyak dan gas bumi, namun karena penerimaan migas jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui maka dalam pemanfaatannya harus seefisien mungkin.

Penerimaan pajak dirasakan sebagai penerimaan yang relative, stabil dan dinamis. Selain itu dari sektor pajak ini dapat kita ketahui bahwa seberapa besarkah wujud dari peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan melalui pembayaran pajak.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil dari pembangunan nasional dan era globalisasi serta reformasi disegala bidang, maka berdasarkan Undang – Undang Perpajakan yang canggih sangat diperlukan, agar dapat dijadikan dasar mengatasi dan mampu meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi. Menyadari hal tersebut, maka pemerintah pada tahun 2000 melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perpajakan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 tahun 2000
- b Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000
- c Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 tahun 2000

Namun perubahan ini tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara Universal yaitu keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan, efisiensi dan efektif dibidang administrasi agar lebih dapat

menciptakan rasa kepastian hukum serta produktifitas negara dan tetap mempertahankan sistem self assesment.

Sistem Self assesment adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan , menyetor dan melaporkan sendiri pajak yng terutang. Oleh karena itu apabila kesadaran wajib pajak meningkat akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya target penerimaan pajak dapat tercapai. Wajib pajak ditempatkan sebagai subjek pelaku karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, membayar sendiri besarnya pajak dengan menggunakan sarana surat pemberitahuan (SPT).

Pilar penjaga dari sistem self assesment adalah kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak. Agar sistem tersebut berjalan dengan efektif dan efisien maka diperlukan suatu pengawasan yang tentunya dilakukan oleh seorang fiskus dan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan administrasi perpajakan mempunyai misi dan tanggung jawab untuk berperan aktif dalam pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas seperti: penyuluhan kepada wajib pajak, pelayanan kepada para wajib pajak, pemeriksaan, pengawasan dan penyelidikan.

Pengawasan terhadap wajib pajak dapat dilakukan melalui pengawasan ketika seorang wajib pajak melaporkan kegiatan usahanya, pengawasan terhadap kewajiban pengisian dan penyampaian SPT baik masa maupun

tahunan, pengawasan terhadap pelunasan hutang pajak termasuk pengawasan pembayaran pajak penghasilan pasal 25. Pengawasan ini perlu dilakukan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Masalah pembayaran pajak penghasilan pasal 25 harus mendapat perhatian yang serius dari para aparat pajak. Dengan adanya pengawasan yang baik dari para aparat pajak diharapkan proses administrasi dapat dilakukan dengan tertib, lancar dan terkendali. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan suatu sistem pengawasan yang sederhana dan memadai serta dapat memperkecil kemungkinan wajib pajak untuk menghindarkan diri dari kewajiban perpajakannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak penghasilan pasal 25, khususnya wajib pajak perorangan. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP BEKASI**

1.2 Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan dalam skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Apakah KPP Bekasi telah menetapkan suatu prosedur pengawasan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 ?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 yang dilaksanakan oleh KPP Bekasi, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi ?
- c. Apakah KPP Bekasi telah menetapkan suatu kriteria untuk menilai tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak penghasilan pasal 25 ?
- d. Bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pembayaran dalam pelaporan pajak PPh pasal 25 di KPP Bekasi ?
- e. Bagaimanakah kendala – kendala atau hambatan yang dihadapi KPP Bekasi dalam melakukan pengawasan pembayaran pajak PPh pasal 25 ?

1.2.2 Pembatasan masalah:

Mengingat luasnya cakupan bidang pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan serta adanya keterbatasan waktu, data , dan biaya maka penulis hanya membatasi masalah pada pengawasan pembayaran masa pajak

penghasilan pasal 25 guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Bekasi.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 khususnya untuk wajib pajak orang pribadi pada KPP Bekasi, dapat meningkatkan kepatuhan WP OP ?
- b. Bagaimana upaya – upaya atau cara – cara yang dilakukan oleh KPP Bekasi untuk mengatasi kendala – kendala atau hambatan – hambatan selama melakukan pengawasan pembayaran PPh pasal 25 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan pembayar pajak PPh pasal 25 pada KPP Bekasi, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi dapat meningkatkan kepatuhan WP OP .
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya – upaya atau cara – cara yang dilakukan oleh KPP Bekasi untuk mengatasi kendala – kendala atau hambatan – hambatan selama melakukan pengawasan pembayaran PPh pasal 25.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

- a. Bagi penulis, dapat menambah mengembangkan wawasan pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pembayaran PPh pasal 25.
- b. Bagi KPP Bekasi, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak untuk melakukan pembayaran PPh pasal 25.
- c. Bagi pembaca termasuk wajib pajak, diharapkan dapat menjadi referensi khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran PPh pasal 25.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu berdasarkan pengumpulan data serta analisis data yang diperoleh selama penelitian yang pada akhirnya akan dihasilkan suatu kesimpulan.

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dan pengumpulan data –data dengan cara membaca buku-buku perpajakan, berbagai majalah, peraturan perundang-undangan perpajakan, bahan-bahan kuliah serta buku-buku lain yang berhubungan erat dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

- b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung di kantor pelayanan pajak (KPP) Bekasi, tempat penulis mengadakan riset dengan melakukan metode:

1) Observasi atau pengamatan

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian lapangan dengan cara melihat secara langsung dan mengerjakan secara langsung pekerjaan yang ada dilapangan.

2) Wawancara (Interview)

Yaitu mengumpulkan data-data melalui wawancara langsung dengan pejabat KPP Bekasi sesuai dengan bidang masing-masing.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini akan diuraikan susunan penyajian skripsi. Skripsi ini terdiri beberapa bab yang secara garis besar mengandung isi sebagai berikut:

Bab I

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar belakang , perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II

Pada bab ini penulis mencoba menguraikan tentang pengertian secara umum pajak khususnya pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi, tentang bagaimana cara perhitungan PPh pasal 25, tentang pengertian umum pengawasan , serta tentang pengertian umum kepatuhan wajib pajak.

Bab III

Pada bab ini penulis mencoba menguraikan mengenai gambaran umum KPP Bekasi yang meliputi tentang sejarah singkat berdirinya KPP Bekasi, tentang struktur organisasinya, tentang kedudukan, tugas serta fungsi KPP Bekasi dalam melayani kepentingan masyarakat luas.

Bab IV

Dalam bab ini penulis mencoba membahas mengenai bagaimana peran pengawasan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 khususnya untuk pajak orang pribadi, serta bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bab V

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan serta saran-saran yang terkandung dari semua pembahasan yang terdapat pada skripsi tersebut, dan saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis yang dapat mendukung penulisan skripsi tersebut.